

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN (BAPPELITBANG) KABUPATEN MINAHASA UTARA

ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF BUDGET REALIZATION REPORT ON BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN (BAPPELITBANG) NORTH MINAHASA REGENCY

Roland Gerald Tooy¹, David Paul Elia Saerang², Lidia Mawikere³

¹²³ *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: Rolandgeraldtooy@gmail.com*

ABSTRAK

Dalam menjalankan pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif untuk dinilai apakah pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran di badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran di BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara, secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015 rata-rata berada pada tingkat 90%-100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran kurang efisien. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran di BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015 pada tingkat 100% yaitu sangat efektif. Sebaliknya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara lebih mengoptimalkan pendapatan/penerimaan dalam menerapkan proyek dan program yang terkait dengan laporan realisasi anggaran dan melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan di daerah agar sesuai dengan harapan dan tujuan serta manfaat untuk kualitas dalam realisasi anggaran di daerah.

Kata Kunci: *efisiensi, efektivitas dan laporan realisasi anggaran.*

ABSTRACT

In running the local governments are required to run the government efficiently and effectively to assess whether local governments can carry out their duties well in achieving goals and objectives. The purpose of this study is to analyze the efficiency and effectiveness of budget realization reports on the planning agency and the research development of North Minahasa Regency. The analytical method used is descriptive method. From the results of research based on the Budget Realization Report in BAPPELITBANG North Minahasa Regency, the overall average level of efficiency of budget realization reports Development Planning Agency and Research Development for the fiscal year 2011 to 2015 the average is at a level of 90% -100%, this indicates that the level of efficiency of budget realization report less efficient. While the overall average level of effectiveness of budget realization reports in BAPPELITBANG North Minahasa regency during the fiscal year 2011 up to 2015 at a rate of 100% is very effective. Instead the government of North Minahasa Regency optimize revenue / receipts in implementing projects and programs related to the budget realization reports and perform priorities in budgetary expenditure in the area to match the expectations and objectives as well as the benefits to the quality of the realization of the budget in the area.

Keywords: *efficiency, effectiveness and the realization of direct budgetary.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, pemerintah mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar (Syafiie 2011:23).

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran.

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Adiwiyana, 2011).

Efisiensi dan Efektivitas sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Menurut (Mahmudi 2011:22), Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sedangkan, efektivitas (Hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan.

Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (back-bone) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan merupakan suatu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan melalui upaya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat atau perencanaan pembangunan partisipatif. Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pada BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara lebih ditekankan pada penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui LAKIP hanya bertumpu pada output yang diperoleh oleh BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan outcome. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut

(Santoso, 2013). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Maka peneliti akan mencoba menganalisis sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran di BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis efisiensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran di BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara.

Tinjauan Pustaka Akuntansi

Menurut American Accounting Association dalam buku (Hery, 2013:3), memberikan pengertian akuntansi sebagai proses mengidentifikasi (to identify), mengukur (to measure), dan melaporkan informasi (to report) ekonomi guna terjadinya penilaian penilai dan keputusan yang jelas (clear decision) dan tegas bagi yang memanfaatkan informasi tersebut. Sehingga akuntansi harusnya dilakukan sebagai salah satu langkah persiapan dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak serta menyangkut keuangan.

Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik (Bastian, 2010:7).

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik Dan Swasta

Perbedaan karakteristik antara sektor publik dengan sektor privat menimbulkan keraguan terkait upaya mengadopsi praktik-praktik sektor swasta kedalam sektor publik termasuk upaya untuk menerapkan *balanced scorecard* disektor pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh (Supranto, 2010:30) bahwa, beberapa orang menanyakan seberapa jauh hal ini bisa terjadi mengingat bahwa operasi pemerintah sifatnya sangat berbeda dengan operasi bisnis. Teriakan untuk membuat lebih efisien, efektif, dan inovatif yang mengejutkan banyak orang sepertinya sia-sia saja.

Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik menurut (Bastian, 2010:61) adalah :

1. Perencanaan Publik
2. Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
3. Penganggaran Publik Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik.
4. Realisasi Anggaran Publik Realisasi anggaran terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.
5. Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.
6. Pelaporan Keuangan Sektor Publik Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
7. Audit Sektor Publik Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Pertanggungjawaban Publik Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya.

Anggaran Sektor Publik

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012:19). Sedangkan pengertian anggaran menurut "Committee on Governmental Accounting" yang dikutip oleh (Haruman, 2010:6) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah pengaplikasian akuntansi di bidang keuangan pemerintahan yang khususnya pada tahapan pencatatan, pelaporan, dan pelaksanaan anggaran termasuk segala pengaruh yang

ditimbulkannya pada suatu tingkat atau unit pemerintahan, baik itu bersifat sementara atau pun permanen (Noerdiawan, 2012:4).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan sendiri memiliki standar tersendiri yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Permendagri No. 64 tahun 2013 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Menurut (Tanjung, 2012:20) menyatakan yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut : PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 03 Laporan Aliran Kas, PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, PSAP 06 Akuntansi Investasi, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAP 12 Laporan Operasional.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No.71 tahun 2010 tentang Standart akuntansi Pemerintahan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas perubahan dan laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi beruoa alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan (Sangian, 2015).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat (MPR), dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut (Mahsun, 2011:81), Definisi anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun. APBD merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2012:10).

Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut (Mahmudi, 2011:22). Sedangkan menurut (Raharjo 2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan isitilah lain *output* per unit *input*.

Efektivitas

Menurut (Mahmudi, 2011:22), efektivitas (hasil Guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas in pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Landasan Empirik

Ramlah (2013) dalam penelitian ini berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyusunan anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Kindangen (2012) dalam penelitian ini berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penegelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dalam penelitian ini Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat eisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang efisien dan tingkat efektivitasnya sangat efektif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Menurut (Sukmadinata, 2011), penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) di Kabupaten Minahasa Utara yang beralamat di kompleks kantor Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2016 sampai juli 2016.

Prosedur penelitian

Prosedur/langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan gambaran umum dan permasalahan yang ada mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara.
2. Mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara
3. Menghitung efisiensi pelaksanaan laporan realisasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara.
4. Menghitung efektivitas laporan realisasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara.
5. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio-rasio antara output/pengeluaran dan input/penerimaan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Minahasa Utara terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak ±19 km dari Ibu Kota Provinsi. Merupakan daerah otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004. Memiliki potensi alam yang luas serta kekayaan sejarah dan budaya daerah yang menjadi daya tarik tersendiri Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah tujuan wisata Indonesia di provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini akan membahas bagaimana Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara pada tahun anggaran 2011 sampai 2015.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat memperoleh data-data yang diperlukan yaitu dari Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara. Data yang diambil adalah Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2011-2015, Realisasi Belanja Rutin, Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara 2011-2015.

Tabel 1
Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Tahun 2011-2015

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2011	Rp. 482.959.390.476,00	Rp. 490.709.689.721,00
2012	Rp. 529.403.435.771,00	Rp. 542.682.298.121,00
2013	Rp. 584.385.630.821,20	Rp. 589.388.340.723,00
2014	Rp. 646.889.321.701,00	Rp. 664.013.622.605,00
2015	Rp. 817.816.583.027,00	Rp. 814.427.565.842,00

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Minahasa Utara 2016

Adapun realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 2
Realisasi Belanja Rutin Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Tahun 2011-2015

No	Tahun	Belanja Rutin (Rp)
1	2011	Rp. 466.521.840.002,00
2	2012	Rp. 528.811.677.569,00
3	2013	Rp. 591.135.454.245,00
4	2014	Rp. 654.834.370.376,00
5	2015	Rp. 802.520.913.049,00

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Minahasa Utara 2016

Pembahasan Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pulasebaliknya.

Tabel 3
Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Pengeluaran (Output)	Penerimaan (Input)	Persentase (%)	Keterangan
2011	Rp.466.521.840.002,00	Rp. 490.709.689.721,00	95,07%	Kurang Efisien
2012	Rp. 528.811.677.569,00	Rp. 542.682.298.121,00	97,44%	Kurang Efisien
2013	Rp. 591.135.454.245,00	Rp. 589.388.340.723,00	100,29%	Tidak Efisien
2014	Rp. 654.834.370.376,00	Rp. 664.013.622.605,00	98,61%	Kurang Efisien
2015	Rp. 802.520.913.049,00	Rp. 814.427.565.842,00	98,53%	Kurang Efisien

Sumber : Data Olahan 2016

Dari hasil perhitungan diatas, maka tingkat Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2011 berada pada tingkat 95,07%, kemudian tahun 2012 berada pada tingkat 97,44% yang berarti kurang efisien, pada tahun 2013 tingkat efisien mencapai pada tingkat 100,29% hal ini diakibatkan adanya kenaikan pada belanja, tahun 2014 berada pada tingkat 98,61%, kemudian pada tahun 2015 berada pada tingkat 98,53% ini berarti kurang efisien. Pola perkembangan efisiensi laporan realisasi anggaran di bappelitbang dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini



Dengan demikian secara keseluruhan dapat diberikan penilaian maka tingkat efisiensi badan perencanaan pembangunan dan pengembangan kabupaten minahasa utara dari tahun 2011-2015 rata-rata berada pada tingkat 90%-100% artinya tingkat efisiensi masih kurang efisien.

Efektivitas

Perhitungan Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Oleh karena itu kebijakan Pemerintah harus dapat mengatur dan meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah agar bisa menyesuaikan dengan pengeluaran rutin sehingga pengelolaan keuangan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara bisa diatur dan menjadi efisien.

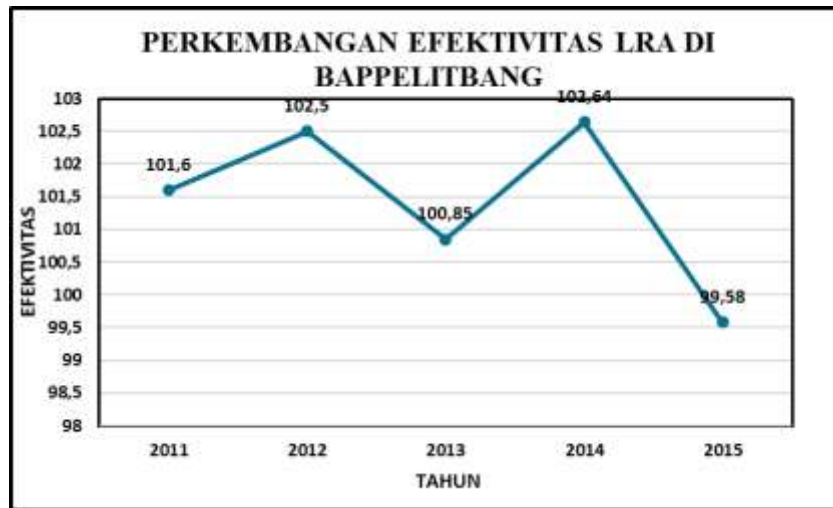
Tabel 4
Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan (Outcome)	Target Penerimaan (output)	Persentase (%)	Keterangan
2011	Rp. 490.709.689.721,00	Rp. 482.959.390.476,00	101,60%	Sangat Eefektif
2012	Rp. 542.682.298.121,00	Rp. 529.403.435.771,00	102,50%	Sangat Eefektif
2013	Rp. 589.388.340.723,00	Rp. 584.385.630.821,20	100,85%	Sangat Eefektif
2014	Rp. 664.013.622.605,00	Rp. 646.889.321.701,00	102,64%	Sangat Eefektif
2015	Rp. 814.427.565.842,00	Rp. 817.816.583.027,00	99,58%	Efektif

Sumber : Data Olahan 2016

Tabel 2 Dari hasil perhitungan diatas, maka tingkat Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2011 berada pada tingkat 101,60%, tahun 2012 berada pada tingkat 102,50%, tahun 2013

berada pada tingkat 100,85% dan tahun 2014 berada pada tingkat 102,64% yang berarti di tahun 2011-2014 berada pada tingkat sangat efektif. Hal ini dikarenakan di tahun 2011-2014 realisasi pendapatan melebihi dari target pendapatan. dan pada tahun 2015 laporan realisasi anggaran mengalami penurunan berada pada tingkat 99,58% yang berarti hanya efektif. Untuk mengetahui pola perkembangan efektivitas laporan realisasi anggaran di bappelitbang dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini:



Dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100% atau semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Dengan demikian secara keseluruhan dapat diberikan penilaian maka tingkat efektivitas badan perencanaan pembangunan dan pengembangan kabupaten minahasa utara dari tahun 2011-2015 rata-rata berada pada tingkat 100% keatas yaitu berada pada tingkat sangat efektif. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2015 tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran tetap masih katagori sangat efektif. Untuk tahun kedepannya pemerintah daerah atau terlebih khusus badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan agar dapat mempertahankan tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam laporan realisasi anggaran dapat dilihat dari tingkat perhitungan efisiensi laporan realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan rumus, yaitu rasio perbandingan dan diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian, maka tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2011-2015 Kurang Efisien dalam penggunaan laporan realisasi anggaran.
2. Tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2011-2015 sudah dikategorikan sangat efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada laporan realisasi anggaran tersebut.

Saran

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara Perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan laporan realisasi anggaran ditahun-tahun selanjutnya, agar pencapaian kegiatan dan program dari tahun ketahun sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan.
2. Diupayakan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan untuk lebih ditingkatkan khususnya penerimaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat menampung pengeluaran daerah demi berbagai kebutuhan rill masyarakat sesuai dengan aspirasinya.
3. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan lebih meningkatkan lagi realisasi penerimaan melebihi apa yang dianggarkan, sehingga dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pemerintah.
4. Disarankan bagi peneliti selanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti laporan realisasi anggaran setiap tahun dan meneliti tentang proses jalannya program kegiatan dan program kerja laporan realisasi anggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA**Paper dalam Jurnal**

- [1] Adiwiyana, Prima. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- [2] Kindangen, Araxta. 2012 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kota Bitung. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT. Manado
- [3] Ramlah, Basri. 2013. "Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM- PD Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal EMBA, 1(4), 202 – 212.
- [4] Sangian, Ardy. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAP (PP No. 24 Tahun 2005) Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal EMBA, 3(4), 413 – 421.
- [5] Santoso, Susan. 2013. "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal EMBA, 1(4), 160 – 170.

Buku

- [6] Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta
- [7] Haruman dan Sri Rahayu. 2010. "*Penyusunan Anggaran*". Edisi Pertama, Salemba Empat. Jakarta.
- [8] Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat: Jakarta.
- [9] Hery. 2013. *Teori akuntansi*. Lembaga Penerbit, FE-UI. Jakarta
- [10] Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. UUI Press. Yogyakarta.
- [11] Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE: Yogyakarta.
- [12] Nafarin. 2012. "*Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*". Edisi Kesatu. Salemba Empat: Jakarta.
- [13] Noerdiwana, Deddi. 2012. *Wiratna Akuntansi Sektor Publik*, Pengertian Akuntansi pemerintahan. Pustaka Baru Press.
- [14] Rahardjo, Adisasmita (2011), *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- [15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Kemendagri.go.id. diakses 22 Mei 2016.
- [16] Pemerintah Republik Indonesia. 2010. "Peraturan Pemerintah Nomor 71". Standart Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. www.djpk.depkeu.go.id akses 24 April 2016.
- [17] Sukmadinata, N. S, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke 7. Remaja Rosdakarya : Bandung
- [18] Supranto, J. 2010. *Statistika*. Jakarta : Erlangga
- [19] Syafiie, Inu Kencana. 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Alfabeta Bandung.
- [20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Negara Republik Indonesia.